

LKJIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
BENGKULU**

***JL. SERUNI NO. 027 KEL. NUSA INDAH KEC. RATU AGUNG
TELP (0736) 7322572 KOTA BENGKULU***

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Organisasi	3
C.1. Struktur Organisasi.....	3
C.2. Fungsi dan Tugas	5
C.3. Keadaan Pegawai	7
C.4. Keadaan Sarana Dan Prasarana	9
C.5. Keuangan	11
A. Isu Strategis	11
B. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Rencana Kerja Tahunan.....	19
D. Perjanjian Kinerja tahun 2025	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025	23
3.2. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2025	25

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Renstra	26
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta alternatif solusi yang dilakukan	27
3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	34
B. Realisasi Anggaran	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja di Masa Yang akan Datang	45

LAMPIRAN

1. IKU Tahun 2025
2. RKT Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025
5. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2025
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Walikota Bengkulu. Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bengkulu dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kepala Daerah Kota Bengkulu. Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amiin.

Bengkulu, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi Dan UKM
Kota Bengkulu



NELAWATI, SP, MM

NIP.19740710 200604 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF **(Summary Executive)**

Dengan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu wajib menyusun LKjIP. Dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Pada tahun anggaran 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu .

Secara umum nilai capaian kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reorientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk dana APBD Rp. . 6.622.512.985,- semua kegiatan telah terealisasi Rp. 5.621.274.048,- dengan capaian 84,88 . Kendala lain yang terjadi adalah perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di jajaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu.

Demikianlah Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran ringkas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025, semoga lebih mendorong pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kebijakan bagi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu

Bengkulu, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi Dan UKM
Kota Bengkulu



NELAWATI, SP, MM
NIP.19740710 200604 2 004

DAFTAR TABEL :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOPERA ^{vii} DAN UKM KOTA BENGKULU

- Tabel 1.1. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Dan UKM Berdasarkan status Kepegawaian dan jenis kelamin.
- Tabel 1.2. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Dan UKM Berdasarkan Golongan / Kepangkatan.
- Tabel 1.3. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Dan UKM Berdasarkan Pendidikan
- Tabel 1.4. Daftar Aset Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025
- Tabel 2.1. Target Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD periode 2024-2026.
- Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025
- Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025
- Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025
- Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja awal sebelum Revisi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu 2025
- Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah Revisi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu 2025
- Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu 2025 dengan tahun sebelumnya ^v

- Tabel 3.4. Realisasi Capaian Kinerja tahun 2025 dan Target Renstra
- Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Sasaran RPJMD periode 2024-2026.
- Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
- Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 3.8. Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025
- Tabel 3.9. Selisih Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025 dan tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

DAFTAR GAMBAR :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOPERASI
DAN UKMKOTA BENGKULU

Gambar 01. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota
Bengkulu

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam hal ini, penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Inspektorat Kota Bengkulu untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu di tahun yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu;
10. Peraturan Daerah Bengkulu Nomor : 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Kota .
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Daerah Kota Bengkulu;
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Kota .
13. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 310 Tahun 2024 tentang Pelimpahan wewenang Wali Kota Bengkulu kepada Kepala Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.17.0000/002 /2025 Tanggal : 06 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025.

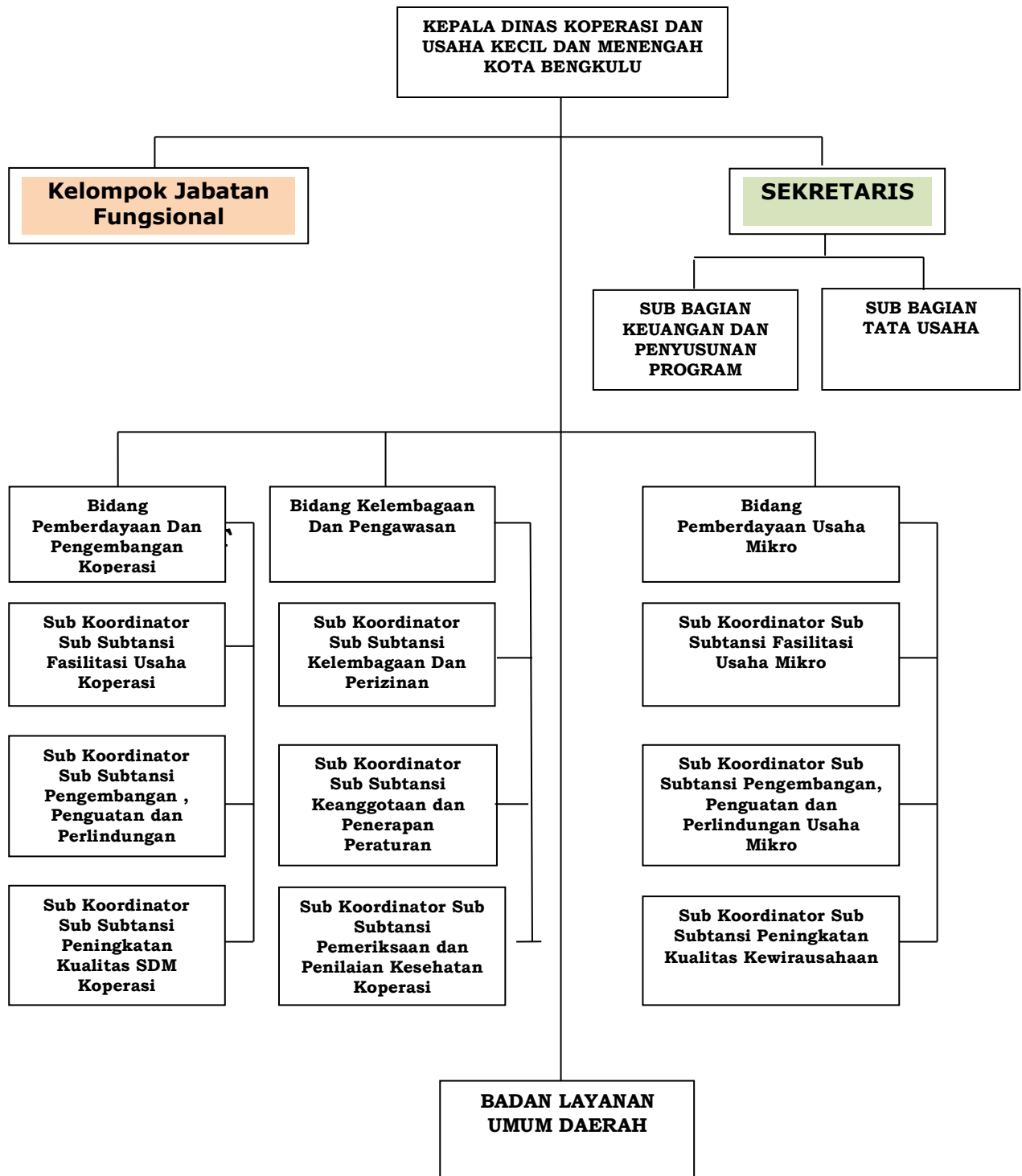
GAMBARAN ORGANISASI

C.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 01

Struktur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu



C. 2. FUNGSI DAN TUGAS

Selanjutnya mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu.

Uraian Fungsi dan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

C. 2.1 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program di bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
- d. pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
- e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
- f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.

- g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
- h. pemberdayaan dan pengembangan usahamikro.
- i. pemeriksaan dan pengawasankoperasi yang wilayah keanggotaandalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah. dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. C.2.2 TUGAS

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.

C. Susunan Organisasi

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretaris.
- 3. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi.
- 4. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan.
- 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 6. Unit BLUD. dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Sekretariat Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Tata Usaha

E. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

1. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan urusan koperasi dalam lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Sub Subtansi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - b. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengembangan , Penguatan dan Perlindungan
 - c. Sub Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

F. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan

1. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pengawasan perkoperasian di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Dan Perizinan
 - b. Sub Koordinator Sub Subtansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

- c. Sub Koordinator Sub Subtansi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

G. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Sub Subtansi Fasilitasi Usaha Mikro
 - b. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - c. Sub Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

C. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah ASN pada Dinas Koperasi Dan UKM dilihat dari berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai berikut : Laki-laki 8 orang (35 %) dan Perempuan 17 orang (65%) dengan Jumlah keseluruhan 25 orang.

Tabel 1.1

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN UKM
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN**

No	PEGAWAI	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
A. Pegawai Negeri Sipil				
1.	Kepala Dinas	1	0	1
2.	Sekretariat	2	6	8
3.	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	3	2	5

4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1	4	5
5.	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	3	3	6
B. Pegawai Kontrak				
6.	Tenaga Kontrak	12	28	40
Total		21	43	65

Jumlah ASN pada Dinas Koperasi Dan UKM dilihat dari Golongan/Pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 5 orang (27 %) Golongan IV, 19 orang (69 %) Golongan III dan sisanya 1 orang (4 %) Golongan II.

Tabel 1.2

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN UKM
BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN**

No	PEGAWAI	GOLONGAN			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	0	0	1	1
2.	Sekretariat	1	6	1	8
3.	Bidang Koperasi	0	4	1	5
4.	Bidang UKM	0	5	0	5
5.	Bidang Pengawasan	0	5	1	6
Total		1	20	4	25

Pegawai ASN pada Dinas Koperasi Dan UKM maupun Tenaga kontrak Sebanyak 7 orang (3 %) berpendidikan SMU dan Diploma III , berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 32 orang (52 %) sisanya 4 orang (35%) yang berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) ASN maupun tenaga Kontrak yang tersebar pada berbagai macam konsentrasi Ilmu.

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN UKM
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	PEGAWAI	PENDIDIKAN			JUMLAH
		SMA/D3	S-1	S-2/3	
1.	Kepala Dinas	0	0	1	1
2.	Sekretariat	1	6	1	8
3.	Bidang Koperasi	1	4	0	5
4.	Bidang UKM	0	3	2	5
5.	Bidang Pengawasan	0	3	3	6
6.	Tenaga Kontrak	7	32	1	40
Total		9	48	8	64

C. 4. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu didukung dengan beberapa peralatan/Asset, baik yang bersifat umum maupun khusus, Aset Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu diperoleh dari hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejauh ini telah cukup untuk memadai untuk menunjang kinerja sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 1.4
DAFTAR ASET DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA BENGKULU TAHUN 5

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Tanah dan Bangunan a. Kantor b. Rumah Dinas	1 Unit 1 Unit	Baik / Pinjam Pakai Rusak Berat

2.	Kendaraan a. Roda Empat b. Roda Dua	4 Unit 84 Unit	Baik Baik 69, 15 Rusak berat
3.	Peralatan Kantor a. Komputer b. MesinHitung c. Wireles d. Printer f. Faximile g. Laptop	10 Unit - 2 Unit 14 Unit 1 Unit 12 Unit	Baik 7, 2 Rusak - Rusak Berat Baik 10 ,4 Rusak berat Kurang Baik Baik 7, 5 Rusak
4.	Perlengkapan Kantor a. Meja Biro b. Meja ½ Biro c. Kursi Direksi d. Kursi Chitos e. Kursi Rapat f. Kursi Plastik g. Kursi Kayu h. Kursi Tamu i. Meja Rapat j. Kipas Angin k. Lemari Arsip Kayu l. Lemari Arsip Besi m. Filling Kabinet n.Papan White Board o. Telpo p. AC	6 Unit 35 Unit 13 Unit 37 Unit 12 unit 30 Unit 10 Unit 2 Set 3 Unit 3 Unit 18 Unit 1 Unit 9 Unit 10 Unit 1 Unit 9 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik 18 rusak Rusak Baik, 1 kurang baik kurang Baik Rusak Kurang Baik Baik Baik 6, 3 Rusak berat Rusak Rusak 1 Kurang Baik
Total			

C. 5. Keuangan

Dukungan Dana dan Anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu di Tahun 2024 berasal dari APBD Kota Bengkulu.

Untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan Indikator sasaran strategis maupun program pendukung yang tercermin dari pelaksanaan DPA Tahun Anggaran

2025 disediakan pagu anggaran sebesar Rp 6.622.512.965 , - dengan rincian Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) Rp 3.375.062.600,- dan Belanja langsung: Rp 2.871.886.965,-.

Dengan demikian total anggaran Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan Program dan kegiatan sejumlah Rp. 5.621.274.048. , -dengan Persentase Realisasi Keuangan Sebesar 84,88 %. Untuk dana APBD Rp. 6.622.512.965,- semua kegiatan telah terealisasi Rp. 5.621.274.048,- dengan capaian 84,88 %,

D. ISU STRATEGIS (*Strategic Issued*)

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya mengamankan bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif.

Berdasarkan analisa lingkungan strategis tersebut maka permasalahan utama atau **ISU STRATEGIS** yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Masih rendahnya dan kurangnya kemampuan manajemen dan permodalan bagi koperasi dan UKM , sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi sektor Koperasi dan UKM , Rendahnya kapasitas manajerial koperasi dan UKM, Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bengkulu.

Beberapa Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu, di antaranya :

1. Kesadaran koperasi tentang pentingnya penilaian kesehatan koperasi masih kurang dalam aspek yang diumulai untuk memenuhi kewajiban kewajiban.
2. Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulan masih kurang.
3. Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan
4. Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib.
5. Semua usaha kecil dan menengah wajib mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan.
6. Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
7. Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
8. Perlu pembinaan dan motivasi koperasi koperasi yang tidak aktif.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan masyarakat Bengkulu pada khususnya. Ini mengingat besarnya potensi yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ditunjukkan oleh dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha serta tersebar di 9 Kecamatan Kota Bengkulu.

Oleh karena itu pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi sangat strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan pekerjaan yang

semakin luas dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan.

Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Menengah Kota Bengkulu pada hakekatnya merupakan upaya merumuskan program, kebijakan dan memberikan pelayanan perijinan perkoperasian serta pembinaan kepada koperasi dan UKM sudah menunjukkan kemajuan, masih terdapat permasalahan yang di hadapi oleh koperasi dan UKM khususnya di Kota Bengkulu.

Masalah SDM ini akan berdampak pada produktivitas dan pengelolaan manajemen. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata pada seluruh UMKM karena terbatas jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis demikian pula dengan keterbatasan akses modal dan informasi pasar.

Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah sangat pentingnya pembangunan di bidang ekonomi melalui ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Koperasi dan UKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar khususnya masyarakat di Kota Bengkulu.

Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumber daya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar.

Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen.

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat pada beberapa fungsi utamanya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaian atau bagaimana mengupayakan agar tujuan dapat tercapai. Adapun cara mencapai tujuan yang meliputi penetapan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Strategi yang digunakan adalah mengembangkan berbagai pendekatan kepada berbagai pihak terkait (stakeholders) untuk diajak berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi guna terwujudnya sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Dalam melaksanakan Misinya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu senantiasa mencermati perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pengaruh yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal menjadi bahan kajian untuk mengevaluasi misi menuju kesempurnaan dan pencapaian hasil yang optimal.

Adapun strategi dalam mengembangkan UMKM Kota Bengkulu merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan internal yang dihadapi.

Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) dalam pengembangan UMKM di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: Pemerintah membuat program-program untuk pengembangan UMKM ,

Perbankan/Lembaga Keuangan memberikan kemudahan dan keringanan kredit , Perbankan/Lembaga Keuangan memberikan kemudahan pembayaran , Pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan tentang bisnis

dalam pengembangan UMKM di Kota Bengkulu antara lain: mempermudah akses permodalan dari perbankan kepada UMKM dengan lebih meningkatkan sosialisasi dan penyederhanaan persyaratan peminjaman, Melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang teknologi dan system pembayaran digital dan pengembangan sektor e-commerce , Melakukan pendampingan dalam kelengkapan administrasi, sehingga UMKM dapat mengakses program-program dari pemerintah, Pelaksanaan event-event promosi untuk UMKM secara berkala di kawasan-kawasan strategis, seperti: Kawasan Kota Tuo, Berendo Bengkulu, dan lainnya. Dari sisi pelaku usaha juga memiliki harapan pada pemerintah sebagai berikut: Memberikan pembinaan usaha terhadap UMKM,. Menyediakan wadah untuk UMKM atau event dan membantu pemasaran produknya, Mempermudah perizinan usaha, Mempermudah dan memberi bantuan dana/modal bagi pelaku UMKM, Menyediakan tempat untuk UMKM seperti lapangan atau lokasi sebagai sentra kuliner,. Memberikan pelatihan kepada UMKM bagaimana cara mengembangkan usahanya, Memberikan kelancaran pada distribusi bahan bakar, 8. Mempermudah akses untuk mendapatkan bahan baku dan menstabilkan harga bahan baku di pasaran.

Dengan karakteristik UMKM yang dinamis, fleksibel, dan aksesibel tetapi memiliki peran strategis dalam perekonomian maka sudah sepantasnya mendapatkan perhatian serius untuk

pengembangannya dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Pengembangan UMKM tentu harus disesuaikan perkembangan dunia yang terjadi dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan masih banyaknya UMK yang dikelola secara konvensional karena pelakunya yang bukan dari generasi milenial saja, sehingga pemanfaatan teknologi masih belum membudaya, maka tantangan yang dihadapi pada pasar dengan konsumen generasi yang berbeda menjadi semakin sulit, dan persaingan dengan pelaku usaha dari generasi milenial menjadi semakin tinggi. Dari analisis SWOT, strategi dalam mengembangkan UMKM Kota Bengkulu adalah strategi stabilitas (turn around) atau strategi yang dibangun atas dasar kelemahan dan memanfaatkan peluang. Dalam hal ini peran pemerintah dan pihak eksternal lain (lembaga keuangan) sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan UMKM

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Organisasi
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kerja Tahunan
- D. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Untuk mendukung Visi Walikota Bengkulu dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean government*) maka Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu memiliki visi:

“ Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah “

Untuk mencapai visi tersebut, misi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu:

1. Mewujudkan peningkatan tata kelola dan kinerja aparatur Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM menuju Kota Bengkulu yang sejahtera.

2. Tujuan dan Sasaran

Misi ke- 1. Mewujudkan peningkatan tata kelola dan kinerja aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1) Tujuan | : | Terlaksananya pekerjaan kantor secara efektif dan efisien |
| Sasaran | : | Terwujudnya pengolahan administrasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor serta kerja sama dan koordinasi yang baik. |
| 2) Tujuan | : | Terwujudnya pelayanan kantor yang |
| Sasaran | : | maksimal |

- Meningkatnya kenyamanan kerja
- 3) Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur
- Sasaran : Meningkatkan disiplin ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu
- 4) Tujuan : Terwujudnya pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel
- Sasaran : Tercapaian kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan perencanaan program Dinas.

Misi ke- 2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berkelanjutan.

- 1) Tujuan : Terciptanya keberpihakan iklim usaha kepada Koperasi dan UKM
- Sasaran : Meningkatkan jumlah dan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian kota Bengkulu.
- 2) Tujuan : Terwujudnya peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM dalam pemasaran produknya.
- Sasaran : Meningkatkan kewirusahaan, kemitraan dan pemasaran produk, pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Misi ke- 3. Mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM menuju Kota Bengkulu yang sejahtera

- 1) Tujuan : Peningkatan akses permodalan bagi Koperasi dan UKM
- Sasaran : Terwujudnya akses permodalan bagi Koperasi dan UKM.

- 2) Tujuan : Peningkatan SDM dan Kelembagaan Koperasi dan UKM
- Sasaran : Terwujudnya SDM, Pengelolaan Koperasi dan UKM yang berkualitas dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan program.
- 3) Tujuan : Peningkatan Pertumbuhan ekonomiKreatif
- Sasaran : Terciptanya peningkatan produkunggulan daerah dan pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Target Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dalam lingkup makro yang berkaitan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Target Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPD
Periode 2024 – 2026

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	8
1	Meningkatnya Kualitas UKM	1	Persentase UKM yang Aktif	UKM	92%	93%	95%
		2	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	UKM	1,3 %	2,1 %	3 %
2	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1	Persentase koperasi Aktif	Koperasi	79 %	80 %	81%
		2	Persentase Peningkatan koperasi yang Berkualitas	Koperasi	29,5%	32 %	34 %

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KOTA BENGKULU 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase UKM yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah UKM yang aktif}}{\text{Jumlah UKM yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Kualitas UKM	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro bina tahun N yang meningkat}}{\text{Jumlah usaha mikro bina tahun N}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM

		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N} - \text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N-1}}{\text{Jumlah koperasi aktif yg berkualitas tahun N}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen RR pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Inspektorat
			Nilai Akip pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	LHE Inspektorat	Inspektorat
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM

C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 yang digunakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025.

Tabel. 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BENGKULU

NAMA INSTANSI : DINAS KOPERASI
DAN UKM
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas UKM	Persentase UKM yang Aktif	92,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang berizin	2,21%	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Sub Kegiatan : Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro mikro	Meningkatnya Usaha UKM melalui pendataan kemitraan ,kemudahan , perizinan , penguatan kelembagaan	UKM	Rp 100.000.000

				Persentase UKM yang berizin		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha UKM melalui pendataan kemitraan ,kemudahan , perizinan , penguatan kelembagaan	UKM	Rp 100.000.000	
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,30%	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM Binaan yang meningkat Omzetnya	1,64%	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil	UKM	Rp 450.000.000

2	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang aktif	79%	PROGRAM PENILAIAN KOPERASI KSP/USP	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	3,7%	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam	Koperasi	Rp	316.473.060
		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	29,5%	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	11%	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam serta Meningkatnya Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen	Koperasi	Rp	165.916.000

				2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan kemitraan	40,25%	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi	Rp	257.479.460
--	--	--	--	--	---	--------	---	---	----------	----	-------------

Kepala Dinas Koperasi Dan UKM

Kota Bengkulu



Drs. EDDYSON

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19661106 199103 1003

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BENGKULU

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (satuan)	TARGE T TAHUN 2025	TARGET KINERJA TRIWULANAN		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (satuan)	TARGET KINERJA TRIWULANAN			URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (satuan)	TARGET KINERJA TRIWULANAN		
								Triwulan	Target	Anggaran			Triwula n	Target	Anggaran
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase UKM yang Aktif	92%	Trw I	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,21%	Trw I	0,0%	-	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Sub Kegiatan : Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro mikro	Meningkatnya Usaha UKM melalui pendataan kemitraan ,kemudahan , perizinan , penguatan kelembagaan / Persentase UKM yang berizin	Trw I	0%	0
				Trw II	50.000.000			Trw II	50,0%	50.000.000			Trw II	50,0%	50.000.000
				Trw III	50.000.000			Trw III	50,0%	50.000.000			Trw III	50,0%	50.000.000
				Trw IV				Trw IV	0,0%				Trw IV		
				Trw I		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,21%	Trw I		-	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan	Meningkatnya Usaha UKM melalui pendataan kemitraan ,kemudahan , perizinan , penguatan kelembagaan	Trw I		-
				Trw II	50.000.000			Trw II	50,0%	50.000.000			Trw II	50,0%	50.000.000
				Trw III	50.000.000			Trw III	50,0%	50.000.000			Trw III	50,0%	50.000.000

				Trw IV				Trw IV	0%		Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Trw IV	0%	
				Trw I		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,64%	Trw I			Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil / Persentase usaha mikro yang naik kelas	Trw I		-
				Trw II				Trw II	25,0%	150.000.000			Trw II	25,0%	150.000.000
				Trw III				Trw III	60,0%	250.000.000			Trw III	60,0%	250.000.000
				Trw IV				Trw IV	15%	50.000.000			Trw IV	15%	50.000.000
		Persentase Koperasi yang Aktif	79,00%	Trw I	81.900.000	PROGRAM PENILAIAN KOPERASI KSP/USP	3,70%	Trw I			Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam	Trw I		
				Trw II				Trw II	0,0%				Trw II	70,0%	216.473.060
				Trw III				Trw III	0,0%	-			Trw III	30,0%	100.000.000
				Trw IV				Trw IV	0,0%	-			Trw IV	0%	
		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	29,50%	Trw I		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	11,00%	Trw I	0,0%		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam serta Meningkatnya Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai kegiatan dengan memenuhi	Trw I	0,0%	
				Trw II	54.450.000			Trw II	75,0%	100.000.000			Trw II	75,0%	100.000.000
				Trw III				Trw III	25,0%	65.916.000			Trw III	25,0%	65.916.000

								Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persyaratan dan/atau Komitmen	Trw IV	0%	
								Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi / Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan kemitraan	Trw I		
										Trw II	80,0%	157.479.460
										Trw III	20,0%	100.000.000
										Trw IV	0%	257.479.460


Drs. EDDYSON
Membina Utama Muda IV.c
No. 196661106 199103 1003

Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dalam lingkup makro yang berkaitan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah Menengah (RPD), tahun 2025.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON II / KEPALA DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BENGKULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas UKM	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,30%
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	29,5%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang	100%

		Perangkat Daerah yang di penuhi	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
		Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas KoperasiKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	1 Dokumen
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi 1 Tahun	2 Inovasi

Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dari sestiap sasaran strategis tersebut, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu merencanakan melaksanakan 06 Program Kerja dengan 11 Kegiatan sub Kegiatan 24, Tahun Anggaran 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A . CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja makro berkaitan dengan sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) periode 2024 – 2026 yang terkait dengan kontribusi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu diuraikan sebagai berikut :

3.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025

Tabel 3.1

untuk setiap pernyataan **Kinerja** Sasaran Strategis pada tabel berikut :

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Sebelum Revisi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi
		SATUAN	VOLUME	
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas UKM	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	UKM	1,30 %	19,85
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	29,5 %	26,7

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi
dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi
		SATUAN	VOLUME	
1	2	3	4	5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	-	-	BB
Meningkatnya kualitas UKM	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	UKM	1,30 %	19,85
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	29,5 %	26,7

Dari **tabel 3.2** dapat kita lihat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 untuk Untuk Sasaran **1 indikator 1** mencapai target dari 1,30 % pelaku usaha (UKM) realisasinya , 19.961 UKM dengan bertambahnya UKM Kelas Kecil sebesar (19,85%), capaian indikator persentase pertumbuhan UMKM sudah menjadi 19.961 UKM yang naik kelas target sesuai pendataan dari seluruh 44.761 UKM ,di lapangan secara riil.

Secara umum capaian indikator pada sasaran **1 indikator 2** untuk Persentase Koperasi yang Berkualitas belum dapat dicapai sesuai dengan terget. Sehingga capaian kinerja tercapai 26,7 %. Apabila dibandingkan dengan volume Jumlah target sebesar 29,5 % pada tahun 2025.

Dari **tabel 3.2** dapat kita lihat dalam Perjanjian Kinerja yang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Atas masukan dari Bapelitbang Kota Bengkulu pada bulan September Tahun 2025 untuk mendukung Perjanjian Kinerja Walikota maka ditambahkan satu Sasaran Strategis dan satu Indikator Kinerja Yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Target Indikator nilai Sakip B

3.2. Perbandingan Antara Realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2025

PerbandinganCapaian Kinerja Dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan
Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	-	BB	B
Meningkatnya kualitas UKM	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	UKM	44,64%	19,85
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	7,06 %	26,7

Dari tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terdapat terdapat Kenaikan realisasi sebelumnya. beberapa indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya tidak sama dengan tahun sebelumnya, dan ada juga ada yang meningkat. untuk pencapaian kinerja **Sasaran 1** Meningkatnya produktivitas UMKM terdiri dari indikator yang mana Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil terjadi kenaikan realisasi untuk perbandingan tahun 2025 dengan realisasi 19,85 % .Dikarenakan pelaku UKM sudah produktif usahanya dilihat dari Omzet dan Aset UMKM Pada tahun 2025 persentase kenaikan volume penjualan UMKM yang difasilitasi pemasarannya mengalami kenaikan untuk capaian realisasinya dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa faktor penyebab peningkatan indikator jumlah Persentase koperasi yang Berkualitas ini tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, dukungan dana melalui program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Pembinaan pengawasan, dan pengembangan koperasi berprestasi dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk pencapaian kinerja **Sasaran 2** terdiri yang mana indikator persentase koperasi yang berkualitas untuk tahun 2024 dengan realisasi 7,06 % koperasi. Dan pada tahun 2025 persentase jumlah anggota koperasi yang sehat mengalami Kenaikan sebesar 26, 7 % .

Persentase koperasi yang berkualitas terjadi kenaikan yang mana Persentase Koperasi yang dinilai 918 Koperasi dikarenakan Kegiatan yang mendukung dari tahun sebelumnya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja TA 2025 dan Target Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTR A	REALISASI KINERJA 2025 (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	-	B	B

Meningkatnya kualitas UKM	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	UKM	1,30 %	19,85
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	29,5 %	26,7

Dari tabel 3.4 terlihat pada capaian RPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena pencapaian **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Tahun 2025 sangat jauh berbeda dengan target Renstra. Untuk **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** tahun 2025 ini Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu lebih ditujukan pada perbaikan indikator- indikator capaian kinerja tersebut dan mengikuti arahan Peraturan Menteri PAN RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja. Perbandingan antara **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** TA 2025 dan Target Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 dengan standar nasional belum bisa dibandingkan karena data standar nasional belum ada.

Laporan pelaksanaan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** untuk Tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sehingga hasil capaian kinerja dapat dibandingkan output dan outcomenya dan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 agar lebih baik.

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Sasaran **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Dari tabel di bawah terlihat bahwa

terdapat dua sasaran dengan dua indikator kinerja sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu .

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Sasaran RPD
Periode 2024 - 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	-	-	B	-
2	Meningkatnya kualitas UKM	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	UKM	1,30%	2,1%	3 %
3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	29,5%	32%	34%

Untuk **Sasaran 1** dengan indikator sasaran Meningkatkan jumlah UKM untuk tahun 2025 target sebesar 44.761 capaian target sebesar 19.961 UKM yang naik kelas target sesuai pendataan dari seluruh UKM , Indikator **Sasaran RPD** sudah tercapai targetnya karena setelah dilakukan Pendataan secara riil dilapangan ada beberapa UKM yang baru. Untuk berhasil dan tercapainya indikator ini perlu adanya dukungan masyarakat pelaku usaha dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu serta didukung oleh iklim yang kondusif untuk berusaha terutama dari segi keamanan dan infastruktur yang berhubungan dengan UKM.

dengan indikator sasaran Persentase peningkatan omzet UKM untuk tahun 2025 capaian dan target realisasinya sebesar 2,1 % Indikator kinerja sudah tercapai targetnya karena setelah dilakukan Pendataan secara riil dilapangan ada beberapa UKM yang baru. Untuk berhasil dan tercapainya indikator ini perlu adanya dukungan masyarakat pelaku usaha dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu serta didukung oleh iklim yang kondusif untuk berusaha terutama dari segi keamanan dan infastruktur yang berhubungan dengan UKM.

Untuk **Sasaran 2** dengan indikator sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi yang Berkualitas target 32% untuk tahun **Sasaran RPD** mencapai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 918 dan **Sasaran RPD** Sebesar 736 , mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Adanya sistem pembuatan E-koperasi;
- b. Sistem pendirian koperasi sudah menggunakan sistem online jadi untuk melengkapi persyaratan pendirian kelompok masyarakat dipermudahkan.
- c. Adanya anjuran dari kementrian koperasi dan UKM RI untuk mendirikan koperasi yang berkualitas bukan berdasarkan kuantitas.

3.4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang dilakukan Perbandingan Analisis Pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target kinerja	Capaian kinerja		capaian 2025 ,%
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	BB	70,15	67,80	67,80
2.	Meningkatnya kualitas UKM	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	UKM	44,64 %	19,85	19,85
3.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	7,06 %	26,7	26,7

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat dua sasaran dengan dua indikator kinerja sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu .

Sasaran 1 dengan Indikator Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil ke 19,85 % Pada Tahun 2023 target sebesar 2,1 % dan peningkatan Indikator Capaian Kinerja karena sudah dilakukan pendataan UKM dan sosialisasi adanya faktor pendorong yaitu :

1. Permodalan.

Selama ini UKM cenderung untuk bisa mengembangkan

usahnya. Dengan modal tambahan para pelaku UKM ini pun tak terhitung besar. Sehingga, Modal Usaha yang meningkat menjadi pendorong bagi para pelaku UKM untuk berkembang.

2. Perizinan yang mudah menjadi salah satu pendorong pengusaha untuk berusaha. Sehingga bantuan pemerintah perlu memfasilitasi para pengusaha untuk mendapat perizinan dengan mudah.
3. Salah satu pendorong lainnya yang dibutuhkan pelaku UKM untuk berkembang adalah akses untuk memasarkan produk. Untuk itu pemerintah harus membantu produk UKM untuk bisa menembus pasar. dengan mengikutkan mereka ke pameran, serta mewajibkan perusahaan besar untuk memakai produk UKM.
4. kemampuan para pelaku UKM dalam hal manajemen. Terutama soal pembukuan, akses proposal perbankan, hingga membuat cashflow. Oleh karena itu, pemerintah harus membina pada pelaku UKM. Selain itu, pemerintah mesti membuat standar akuntansi yang sederhana untuk mereka.
5. Pelaku UKM yang sudah bergerak melalui pemasaran online semakin meningkat dan jaringan bisnis sudah mengarah ke era e-commerce.

dengan indikator Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil yang terjadi Kenaikan volume Persentase Peningkatan Omzet UKM berhasil mencapai target yang ditetapkan Ini disebabkan semakin meningkatnya kepercayaan pihak terhadap usaha kecil menengah di Kota Bengkulu untuk tambahan Modal Usaha. Sehingga modal usaha pelaku UKM semakin kuat dalam pembiayaan usaha sehingga faktor pendukung finansial

merupakan salah satu faktor utama yang menentukan perkembangan omzet UKM. Dengan Indikator Persentase Peningkatan Omzet UKM adanya faktor Pendorong yaitu :

1. Modal

Pelaku UKM sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan/modal usaha dan pelaku UKM sudah banyak mendapatkan informasi tentang tambahan modal usaha

2. Sumber daya manusia

Meningkatnya pengetahuan mengenai teknologi baru yang bisa mempercepat produksi, serta pengetahuan guna tetap dapat mengontrol kualitas produk yang ada. Pemasaran terhadap sebuah produk menjadi strategi marketing utama.

3. Izin Usaha

Izin usaha UKM sudah difasilitasi oleh pihak terkait yang terdaftar dan legalitas

4. Akuntabilitas

Pada pelaku UKM yang terdapat di kota Bengkulu sudah mendapatkan pelatihan urusan manajemen usaha yang baik dan urusan administrasi.

5. Iklim usaha yang kondusif

peningkatan koordinasi antar pengelola/pengusaha UKM Lembaga pemerintahan, lembaga edukasi dan lembaga-lembaga finansial yang ada berlangsung sudah bersinergi.

6. Infrastruktur

Fasilitas sarana dan prasarana usaha terutama bersangkutan dengan alat-alat teknologi, untuk UKM dalam inovasi produk dan pemasaran sudah berkembang.

7. Akses

Tersedianya Akses untuk UKM guna mengakses bahan baku yang bagus dan berkualitas. Akses guna mendapatkan teknologi yang terbaru , sudah mulai meningkat untuk akses .

Sasaran 2 dengan indikator sasaran Persentase Koperasi yang Berkualitas untuk tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 26,7 % dengan target Kinerja sasaran Pada Tahun 2025 target disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :Persentase koperasi yang berkualitas terjadi kenaikanyang mana Persentase Koperasi yang dinilai 918 Koperasi dikarenakan adanya Kegiatan yang mendukung dari tahun sebelumnya. Dengan demikian menyebabkan berpengaruh pada anggota pada peningkatan jumlah anggota koperasi.

3.5 .Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber daya

Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan apabila Capaian Kinerja melebihi 100% atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan Program, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	REALISASI Sasaran RPD 2025	Keterangan
1	2	4	5	6
1	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	1,30%	19,85	Mencapai Target yang diupayakan
	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	29,5%	26,7	Mencapai target

terjadinya efisiensi sumber daya dalam pencapaian Kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Sasaran yang mencapai target dikarenakan sumber daya yang ada berupa Anggaran, Aset maupun SDM yang tersedia mampu dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga capaian kinerja melebihi target.

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

A. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 189.275.000,- atau dalam persentase sebesar 99,62% .

Pada Analisis Kegiatan ini yang menyebabkan teralisasinya

serapan anggaran dikarenakan Jumlah izin usaha simpan pinjam bagi koperasi Ini tercapai dengan kegiatan untuk penyediaan Badan Hukum Koperasi ,layanan yang disediakan oleh koperasi, Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 59.253.600,- terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. **58.904.000,-** atau dalam persentase sebesar **99,41%** . Pada Analisis Kegiatan ini yang menyebabkan Jumlah monitoring dan evaluasi bagi koperasi penerima bantuan dana bergulir tercapai.

B. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dianggarkan sebesar Rp. 50.794.000 ,-teralisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.289.000,- atau dalam persentase sebesar 99,01%

Pada Analisis Kegiatan ini yang menyebabkan teralisasinya serapan anggaran dikarenakan Kegiatan Meningkatnya optimalisasi kompetensi dan komitmen SDM Dalam Kelembagaan koperasi untuk pengembangan kinerja manajerial yang profesional sebagai outcomes .Ditunjukkan dalam bentuk .Pemanfaatan layanan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang terhadap jalannya kehidupan berkoperasi.

A. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.393.000,- terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 57.921.900 atau dalam persentase sebesar 95,91%.

Pada Analisis Kegiatan ini teralisasinya serapan anggaran dikarenakan Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ini untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah mengalami peningkatan.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 166.715.115 ,- terealisasi keseluruhan sebesar Rp. **166.558.272,- (99,01%)** .

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pada Analisis Kegiatan ini yang menyebabkan teralisasinya serapan anggaran dikarenakan berkembangnya Jumlah monitoring dan evaluasi bagi koperasi Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan

kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu tahun 2025.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro ini dianggarkan sebesar Rp. 69.040.000 ,-terrealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 23.021.255,- atau dalam persentase sebesar 33,34% Pada Analisis Kegiatan ini yang menyebabkan kurang teralisasinya serapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi Anggaran Pertengan Tahun 2025. Sub Kegiatan : peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 164.140.000,- terealisasi keseluruhan sebesar Rp. 28.893.099,- (17,60%%) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang menyebabkan kurang teralisasinya serapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi Anggaran Pertengan Tahun 2025.

E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,-terrealisasi keseluruhan sebesar Rp. 251.000.00,-

(83.67 %). Pada Analisis Kegiatan ini yang menunjang Keberhasilan atau teralisasinya serapan dikarenakan beberapa pelaku UKM dalam pemasaran dan promosi telah mendapatkan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana langkah tersebut harus agar UKM dapat benar-benar naik kelas dan mampu menjalankan industrinya secara jangka panjang.

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 46.000.000 , dan terealisasi Rp 45.780.000 (99,52%),
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.024.000 , dan terealisasi Rp 18.024.000 , (100%).
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 107.500.000 dan telah terealisasi Rp 104.388.650 atau sebesar (97,11%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.250.000,- pada kegiatan ini terealisasi pembayaran biaya cetak dan pembayaran biaya penggandaan atau dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp 29.070.000 (87,43%),

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.880.000 dan terealisasi Rp 10.000.000 (84,18%%).
- 6) Penyediaan Bahan Material /Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 46.027.000 dan terealisasi Rp 41.999.500 (91,25% %),
- 7) Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu /Makanan Dan Minuman Kegiatan ini dianggarkans ebesar Rp 23.950.000 dan terealisasi Rp 17.787.250 atau sebesar (74,27% %)
- 8) Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Rapat Koordinasi ini dianggarkan sebesar Rp 92.000.000 dan terealisasi 90.573.579,- atau sebesar (98,45%).
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.686.500,. Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya administrasi surat-menyurat berupa materai dan benda pos lainnya dan belanja paket/pengiriman dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp. 2.550.000 (54,41%),
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000. Pada kegiatan ini terealisasi pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaranlistrik, pembayaraninternet, dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp **58.081.046 (82,97%)**, Pada kegiatan ini telah dilaksanakan upaya penghematan/efisiensi terhadap penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon sehingga dapat menekan biaya pengeluaran.
- 11) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan telah terealisasi Rp 39.655.000 atau sebesar (99,14% %)

12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium gaji pegawai honorer dianggarkan sebesar Rp 580.500.000 dan terealisasi Rp 391.871.100 atau sebesar (67,51%).

13) Penyediaan Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.750.626.000, Pada kegiatan ini terealisasi pembayaran Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN atau dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp 3.400.224.047 (90,66%%),

14) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 142.640.000, Pada kegiatan ini terealisasi pembayaran honorariumpenatausahaan keuangan dan barang milik daerah, pembayaran uang lembur PNS atau dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp 128.080.000 (89,79%),

15) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan;Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 151.653.721.

Pada kegiatan ini terealisasi pembayaran jasa servis kendaraan, belanja penggantian suku cadang, pembayaran bahan bakar minyak (BBM), atau dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp. 116.547.000 (76,85% %),

16) Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini dianggarkan sebesar Rp 343.439.429

Pada kegiatan ini terealisasi pembayaran Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan keseluruhan realisasi sebesar Rp 300.780.350 (87,58%),

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja dari ke 2 (dua) sasaran strategis diatas tidak terlepas dari adanya dukungan penganggaran dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan yang harus dilaksanakan guna keberhasilan pencapaian kinerja organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan anggaran dan realisasinya yang digunakan dan telah digunakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecildan Menengah Kota Bengkulu di Tahun 2025. Realisasi anggaran yang tercermin dari pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025 dalam mendukung kinerja dan menunjang operasional Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 6.838.551.309 dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan): Rp 3.341.768.909,-
2. Belanja langsung : Rp 3.496.782.400,-
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 3.341.768.909,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.496.782.400,-,-
 - c. Belanja Modal : Rp 0,00
- Jumlah : Rp 6.838.551.309,

Dengan demikian total anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecildan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 setelah adanya perubahan atau pergeseran anggaran tetap menjadi Rp. 6.838.551.309 (Enam milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima rupiah),

Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan jenis belanja dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Penggunaan Anggaran Setiap Kegiatan (Belanja Langsung)
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu
Tahun 2025

Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.000.000	45.780.000	99,52
	Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN	3.750.626.000	3.400.224.047	90,66
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.640.000	128.080.000	89,79
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	18.024.000	18.024.000	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.500.000	104.388.650	97,11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.250.000	29.070.000	87,43
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.880.000	10.000.000	84,18
	Penyediaan Bahan Material	46.027.000	41.999.500	91,25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.950.000	17.787.250	74,27
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	92.000.000	90.573.579	98,45
	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	4.686.500	2.550.000	54,41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	70.000.000	58.081.046	82,97
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000	39.655.000	99,14
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	580.500.000	391.871.100	67,51

Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.653.721	116.547.000	76,85
	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	343.439.429	300.780.350	87,58
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	189.275.000	99,62
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.253.600	58.904.000	99,41
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.794.000	50.289.000	99,01
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.393.000	57.921.900	95,91
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usah	166.715.115	166.558.272	99,91

Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	69.040.000	23.021.255	33,34
	peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	164.140.000	28.893.099	17,60
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	300.000.000	251.000.000	83,67

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat dari total anggaran Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu tahun Anggaran 2025 sebesar 6.622.512.985,-. terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.750.626.000,- yang terealisasi sebesar Rp 3.400.224.047,- . (90,66 %) dan belanja langsung Rp. 2.871.886.985,- .yang terealisasi sebesar Rp. 2.221.050.001 (77,34%) .

Tabel 3.9

Selisih Anggaran Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2024 dan 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	REALISASI KEUANGAN		SELISIH
		2024	2025	
A	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)	3.341.768.909	3.400.224.047	(58.455.138),-
B	Belanja Langsung	3.496.782.400	2.221.050.001	1.275.732.399
Jumlah		6.838.551.309	5.621.274.048	1.217.277.261

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 merupakan gambaran keberhasilan maupun kegagalan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Walikota Bengkulu selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun 2025 dapat dilihat dari capaian realisasi fisik maupun capaian realisasi anggaran yang telah diraih pada Tahun 2025.

Capaian atas target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terhadap 5 indikator, 4 indikator berhasil mencapai target dan ada 1 yang melampaui target, dan 1 berhasil mencapai target.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun 2025 terhadap 2 (Dua) sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Program dengan 25 (Dua Puluh lima) menunjukkan tingkat capaian persentase realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 84,88% mengalami penurunan sebesar 13,86 % dari realisasi anggaran pada tahun 2025 . dikarenakan adanya efisiensi anggaran / pemangkasan dari APBD Kota Bengkulu

Dari data berarti secara umum target-target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 telah tercapai atau capaian kinerja dikategorikan berhasil.

Dari sisi keuangan, untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 6.622.512.985,- yang terealisasi sebesar Rp. 5.621.274.048,-,- (84,88 %)

Hasil Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2025 , dari total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 6.838.551.309,- Yang terealisasi sebesar Rp. 6.725.252.001 atau 98,34 %).

Dengan demikian untuk Tahun 2025 Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu mampu terjadi penurunan penghematan anggaran sebesar 8,89 %. dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Tahun Anggaran 2025

A. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Dari hasil pencapaian ditahun 2025 ini, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Beberapa langkah yang akan dilakukan diantaranya :

- 1) Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dengan penganggaran yang memadai.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran pada seluruh program dan kegiatan.
- 3) Melakukan langkah antisipatif terhadap perubahan aturan-aturan yang dapat mengakibatkan anggaran yang tersedia tidak dapat direalisasikan dengan selalu melakukan update terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kantor agar dapat lebih optimal mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu
- 5) Terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas (kapasitas dan kapabilitas) aparatur untuk peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dapat mewujudkan perannya sebagai organisasi yang dapat meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Kota Bengkulu dan meningkatkan nilai investasi dan perdagangan di Kota Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KOTA
BENGKULU**



NELAWATI, SP, MM
NIP.19740710 200604 2 004